

BAB III
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN
PENYAKIT MASYARAKAT

A. Analisis

1. Upaya Penanggulangan

a. Kebijakan yang dilaksanakan

1) Antisipasi Pelacuran/Prostitusi

Kebijakan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul, sesuai dengan uraian tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1
Analisis Upaya dalam Antisipasi Prostitusi di Tahun 2017

No.	Tingkat Jawaban	Jumlah Responden	Prosentase
1.	Sangat Setuju	7	17,5 %
2.	Setuju	13	32,5 %
3.	Biasa Saja	11	27,5 %
4.	Kurang Setuju	6	15 %
5.	Tidak Setuju Sama Sekali	3	7,5 %
Jumlah		40	100 %

Sumber : Hasil Penelitian Dilapangan, Tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah responden paling banyak memilih setuju, yaitu sebesar 13 orang dengan prosentase 32,5 %. Kemudian, untuk jumlah responden yang tidak setuju sama sekali, sebanyak 3 orang dengan prosentase 7,5 %, dari jumlah keseluruhan responden sebanyak 40 orang atau 100 %.

Selanjutnya, dari hasil kuisisioner yang diberikan kepada masing-masing responden, mereka berpendapat sebagai berikut :

“Setuju, perlunya intensitas sosialisasi pendampingan wanita rawan sosial, khususnya dipesisir selatan”. (Hasil Kuisisioner tanggal 7-21 Februari 2018)

*“Setuju, karena penanggulangan itu sangat positif dan dapat mencegah penyakit yang berhubungan dengan HIV AIDS”.
(Hasil Kuisisioner tanggal 7-21 Februari 2018)*

Menurut penjelasan dari masing-masing responden, mereka berpendapat setuju terhadap kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam menanggulangi pelacuran/prostitusi yang terselubung, yaitu bekerjasama dengan berbagai instansi keamanan seperti Satpol PP dan Dinas Sosial, sehingga permasalahan mengenai prostitusi dapat segera ditanggulangi.

2) Antisipasi Perjudian

Kebijakan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul, sesuai dengan uraian tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2

Analisis Upaya dalam Antisipasi Perjudian di Tahun 2017

No.	Tingkat Jawaban	Jumlah Responden	Prosentase
1.	Sangat Setuju	6	15 %
2.	Setuju	17	42,5 %
3.	Biasa Saja	12	30 %
4.	Kurang Setuju	4	10 %
5.	Tidak Setuju Sama Sekali	1	2,5 %
Jumlah		40	100 %

Sumber : Hasil Penelitian Dilapangan, Tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah responden paling banyak memilih setuju, yaitu sebesar 17 orang dengan prosentase 42,5 %.. Kemudian, untuk jumlah responden yang

tidak setuju sama sekali, sebanyak 1 orang dengan prosentase 2,5 %, dari jumlah keseluruhan responden sebanyak 40 orang atau 100 %.

Dari hasil kuisisioner yang diberikan kepada masing-masing responden, mereka berpendapat sebagai berikut :

“Setuju, jika pemerintah sudah menanggulangi perjudian dengan baik karena sangat mengganggu masyarakat sekitar”.
(Hasil Kuisisioner tanggal 7-21 Februari 2018)

“Setuju, dikarenakan perjudian sangat meresahkan masyarakat dan membuat tingkat kriminalitas semakin tinggi”.
(Hasil Kuisisioner tanggal 7-21 Februari 2018)

Menurut penjelasan dari masing-masing responden, mereka berpendapat setuju terhadap kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam menanggulangi perjudian, dengan cara bekerjasama dengan berbagai instansi keamanan seperti Polres dan Satpol PP.

b. Kebijakan yang diantisipasi

1) Antisipasi Narkoba

Kebijakan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul, sesuai dengan uraian tabel sebagai berikut :

Tabel 3.3

Analisis Upaya dalam Antisipasi Narkoba di Tahun 2017

No.	Tingkat Jawaban	Jumlah Responden	Prosentase
1.	Sangat Setuju	4	10 %
2.	Setuju	15	37,5 %

3.	Biasa Saja	13	32,5 %
4.	Kurang Setuju	7	17,5 %
5.	Tidak Setuju Sama Sekali	1	2,5 %
Jumlah		40	100 %

Sumber : Hasil Penelitian Dilapangan, Tahun 2018

Dari tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah responden paling banyak memilih setuju, yaitu sebesar 15 orang dengan prosentase 37,5 %. Kemudian, untuk jumlah responden yang tidak setuju sama sekali, sebanyak 1 orang dengan prosentase 2,5 %, dari jumlah keseluruhan responden sebanyak 40 orang atau 100 %.

Berdasarkan hasil kuisisioner yang diberikan kepada masing-masing responden, mereka berpendapat sebagai berikut :

“Setuju, karena pemerintah sudah melakukan upaya terkait dengan penanggulangan narkoba, termasuk dengan adanya lembaga rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba”. (Hasil Kuisisioner tanggal 7-21 Februari 2018)

Menurut penjelasan dari masing-masing responden, mereka berpendapat setuju, terhadap kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam mengantisipasi narkoba, dengan cara bekerjasama dengan berbagai instansi keamanan seperti: Polres dan BNN (Badan Narkotika Nasional). Dari adanya kerjasama tersebut, diharapkan kasus-kasus narkoba di Kabupaten Gunungkidul dapat segera ditangani.

2) Antisipasi Miras

Kebijakan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Daerah Kabupaten Gunungkidul, sesuai dengan uraian tabel sebagai berikut :

Tabel 3.4

Analisis Upaya dalam Antisipasi Miras di Tahun 2017

No.	Tingkat Jawaban	Jumlah Responden	Prosentase
1.	Sangat Setuju	8	20 %
2.	Setuju	10	25 %
3.	Biasa Saja	11	27,5 %
4.	Kurang Setuju	10	25 %
5.	Tidak Setuju Sama Sekali	1	2,5 %
Jumlah		40	100 %

Sumber : Hasil Penelitian Dilapangan, Tahun 2018

Dari tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah responden paling banyak memilih biasa saja, yaitu sebesar 11 orang dengan prosentase 27,5 %. Kemudian, untuk jumlah responden yang tidak setuju sama sekali, sebanyak 1 orang dengan prosentase 2,5 %, dari jumlah keseluruhan responden sebanyak 40 orang atau 100 %.

Berdasarkan hasil kuisioner yang diberikan kepada masing-masing responden, mereka berpendapat sebagai berikut :

“Sudah ada upaya dari tingkat bawah, terkait antisipasi minuman-minuman keras dikalangan masyarakat, terutama anak muda yang dilakukan oleh Katimnas, dengan melakukan penyisiran”. (Hasil Kuisioner tanggal 7-21 Februari 2018)

Menurut penjelasan dari masing-masing responden, mereka berpendapat biasa saja, terhadap kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam mengurangi peredaran miras di kalangan masyarakat, khususnya daerah pesisir. Untuk mengurangi hal tersebut, pemerintah telah bekerjasama dengan berbagai instansi keamanan seperti Satuan SABARA (Polres) dan Satpol PP, sehingga peredaran miras dapat ditanggulangi.

c. Lingkungan

1. Keluarga

a) Sosialisasi Dinas Pendidikan

Kebijakan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten

Gunungkidul, sesuai dengan uraian tabel sebagai berikut :

Tabel 3.5

Analisis Upaya Sosialisasi Dinas Pendidikan di Tahun 2017

No.	Tingkat Jawaban	Jumlah Responden	Prosentase
1.	Sangat Setuju	15	37,5 %
2.	Setuju	14	35 %
3.	Biasa Saja	9	22,5 %
4.	Kurang Setuju	1	2,5 %
5.	Tidak Setuju Sama Sekali	1	2,5 %
Jumlah		40	100 %

Sumber : Hasil Penelitian Dilapangan, Tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah responden paling banyak memilih sangat setuju, yaitu sebesar 15 orang dengan prosentase 37,5 %. Kemudian, untuk jumlah responden yang tidak setuju sama sekali, sebanyak 1 orang dengan prosentase sebesar 2,5 %, dari jumlah keseluruhan responden sebanyak 40 orang atau 100 %.

Selanjutnya, dari hasil kuisisioner yang diberikan kepada masing-masing responden, mereka berpendapat sebagai berikut :

“Sangat setuju, karena pendidikan sangat penting untuk anak-anak dan apabila tanpa pendidikan, maka anak-anak tidak akan mengerti apa itu belajar serta sekolah”. (Hasil Kuisisioner tanggal 7-21 Februari 2018)

“Sosialisasi sangat diperlukan untuk memberikan pemahaman kepada masing-masing orang tua, agar mampu mendidik anaknya sejak dini”. (Hasil Kuisisioner tanggal 7-21 Februari 2018)

Menurut penjelasan dari masing-masing responden, mereka berpendapat sangat setuju, terhadap kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul mengenai pentingnya sekolah kepada masing-masing orang tua. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, maka pemerintah telah bekerjasama dengan berbagai instansi seperti: Sekolah dan Dinas Pendidikan, agar mampu memberikan sosialisasi dan pemahaman terkait pentingnya sekolah bagi anak sejak dini.

b) Sosialisasi Dinas Sosial

Kebijakan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul, sesuai dengan uraian tabel sebagai berikut :

Tabel 3.6

Analisis Upaya Sosialisasi Dinas Sosial di Tahun 2017

No.	Tingkat Jawaban	Jumlah Responden	Prosentase
1.	Sangat Setuju	13	32,5 %
2.	Setuju	17	42,5 %
3.	Biasa Saja	8	20 %
4.	Kurang Setuju	1	2,5 %
5.	Tidak Setuju Sama Sekali	1	2,5 %
Jumlah		40	100 %

Sumber : Hasil Penelitian Dilapangan, Tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah responden paling banyak memilih setuju, yaitu sebesar 17 orang

dengan prosentase 42,5 %. Kemudian, untuk jumlah responden yang tidak setuju sama sekali, sebanyak 1 orang dengan prosentase 2,5 %, dari jumlah keseluruhan responden sebanyak 40 orang atau 100%

Selanjutnya, dari hasil kuisioner yang diberikan kepada masing-masing responden, mereka berpendapat sebagai berikut :

“Peran Dinas Sosial sangat diperlukan untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat, terkait bahaya penyakit masyarakat tersebut. Akan tetapi, tidak semua penyakit masyarakat ditangani oleh Dinas Sosial, sebab lembaga mempunyai fungsi sendiri-sendiri”. (Hasil Kuisioner tanggal 7-21 Februari 2018)

Menurut penjelasan dari masing-masing responden, mereka berpendapat setuju, terhadap kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mengenai bahaya penyakit masyarakat. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, maka pemerintah telah bekerjasama dengan berbagai instansi seperti: Sekolah dan Dinas Sosial, agar mampu memberikan sosialisasi dan pemahaman terkait bahaya penyakit masyarakat, beserta cara menanganinya.

2. Agama

1) Al-Qur'an

Kebijakan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul, sesuai dengan uraian tabel sebagai berikut :

Tabel 3.7

Analisis Upaya Sosialisasi Pendidikan Agama berdasarkan Al-Qur'an di Tahun 2017

No.	Tingkat Jawaban	Jumlah Responden	Prosentase
1.	Sangat Setuju	13	32,5 %
2.	Setuju	14	35 %
3.	Biasa Saja	13	32,5 %
4.	Kurang Setuju	0	0 %
5.	Tidak Setuju Sama Sekali	0	0 %
Jumlah		40	100 %

Sumber : Hasil Penelitian Dilapangan, Tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah responden paling banyak memilih setuju, yaitu sebesar 14 orang dengan prosentase 35 %. Kemudian, untuk jumlah responden yang tidak setuju sama sekali, sebanyak 0 orang dengan prosentase 0 %, dari jumlah keseluruhan responden sebanyak 40 orang atau 100%

Selanjutnya, dari hasil kuisisioner yang diberikan kepada masing-masing responden, mereka berpendapat sebagai berikut :

“Setuju, karena dengan adanya sosialisasi dan bimbingan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Gunungkidul, melalui sekolah, masjid dan kantor agama setempat, maka masyarakat dapat lebih memahami agama dengan baik”. (Hasil Kuisisioner tanggal 7-21 Februari 20180)

Menurut penjelasan dari masing-masing responden, mereka berpendapat setuju, terhadap kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul, mengenai pentingnya Kitab Suci Al-Qur'an. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, maka pemerintah telah bekerjasama dengan Kantor Agama dan masyarakat,

agar dalam proses pelaksanaannya dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

2) Hadits

Kebijakan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul, sesuai dengan uraian tabel sebagai berikut :

Tabel 3.8

Analisis Upaya Sosialisasi Pendidikan Agama berdasarkan Hadits di Tahun 2017

No.	Tingkat Jawaban	Jumlah Responden	Prosentase
1.	Sangat Setuju	10	25 %
2.	Setuju	14	35 %
3.	Biasa Saja	16	40 %
4.	Kurang Setuju	0	0 %
5.	Tidak Setuju Sama Sekali	0	0 %
Jumlah		40	100 %

Sumber : Hasil Penelitian Dilapangan, Tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah responden paling banyak memilih biasa saja, yaitu sebesar 16 orang dengan prosentase 40 %. Kemudian, untuk jumlah responden yang

tidak setuju sama sekali, sebanyak 0 orang dengan prosentase 0 %, dari jumlah keseluruhan responden sebanyak 40 orang atau 100 %.

Selanjutnya, dari hasil kuisisioner yang diberikan kepada masing-masing responden, mereka berpendapat sebagai berikut :

“Dalam menyampaikan kemuliaan perilaku Nabi Muhammad SAW, Pemerintah telah melakukan pengajian-pengajian yang dilaksanakan di masing-masing wilayah dan memberikan dampak positif bagi masyarakat”. (Hasil Kuisisioner tanggal 7-21 Februari 2018)

Menurut penjelasan dari masing-masing responden, mereka berpendapat biasa saja, terhadap kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul, mengenai pentingnya Kitab Suci Al-Qur'an. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, maka pemerintah telah bekerjasama dengan Kantor Agama, sekolah dan masyarakat, agar dalam proses pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan mampu menekan penyakit masyarakat tersebut.

3. Budaya

1) Budaya Bangsa

Kebijakan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul, sesuai dengan uraian tabel sebagai berikut :

Tabel 3.9

Analisis Upaya Pendidikan Budaya Bangsa di Tahun 2017

No.	Tingkat Jawaban	Jumlah Responden	Prosentase
1.	Sangat Setuju	8	20 %
2.	Setuju	22	55 %
3.	Biasa Saja	10	25 %
4.	Kurang Setuju	0	0 %
5.	Tidak Setuju Sama Sekali	0	0 %
Jumlah		40	100 %

Sumber : Hasil Penelitian Dilapangan, Tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah responden paling banyak memilih setuju, yaitu sebesar 22 orang dengan prosentase 55 %. Kemudian, untuk jumlah responden yang tidak setuju sama sekali, sebanyak 0 orang dengan prosentase 0 %, dari jumlah keseluruhan responden sebanyak 40 orang atau 100 %.

Selanjutnya, dari hasil kuisisioner yang diberikan kepada masing-masing responden, mereka berpendapat sebagai berikut :

“Setuju, dikarenakan budaya bangsa perlu dilestarikan sebagai identitas dan jati diri bagi bangsa itu sendiri serta pemahaman tersebut dapat diberikan di sekolah”. (Hasil Kuisisioner tanggal 7-21 Februari 2018)

Menurut penjelasan dari masing-masing responden, mereka berpendapat Setuju, terhadap kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mengenai pentingnya Budaya Bangsa bagi masyarakat. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, maka pemerintah telah bekerjasama dengan Dinas Kebudayaan dan sekolah.

2) Budaya Daerah

Kebijakan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul, sesuai dengan uraian tabel sebagai berikut :

Tabel 3.10

Analisis Upaya Pendidikan Budaya Daerah di Tahun 2017

No.	Tingkat Jawaban	Jumlah Responden	Prosentase
1.	Sangat Setuju	12	30 %
2.	Setuju	22	55 %
3.	Biasa Saja	6	15 %
4.	Kurang Setuju	0	0 %
5.	Tidak Setuju Sama Sekali	0	0 %
Jumlah		40	100 %

Sumber : Hasil Penelitian Dilapangan, Tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah responden paling banyak memilih setuju, yaitu sebesar 22 orang dengan prosentase 55 %. Kemudian, untuk jumlah responden yang tidak setuju sama sekali, sebanyak 0 orang dengan prosentase 0 %, dari jumlah keseluruhan responden sebanyak 40 orang atau 100%.

Selanjutnya, dari hasil kuisisioner yang diberikan kepada masing-masing responden, mereka berpendapat sebagai berikut :

“Setuju, pendidikan budaya daerah perlu dilestarikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul agar identitas bangsa tetap terjaga”. (Hasil Kuisisioner tanggal 7-21 Februari 2018)

Menurut penjelasan dari masing-masing responden, mereka berpendapat Setuju, terhadap kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, mengenai pentingnya Budaya Daerah bagi masyarakat. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, maka pemerintah telah bekerjasama dengan Dinas Kebudayaan dan sekolah

agar dapat memberikan pemahaman agar mampu melestarikan Budaya Bangsa yang ada di daerah.

4. Ekonomi

1) Lapangan Pekerjaan

Kebijakan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul, sesuai dengan uraian tabel sebagai berikut :

Tabel 3.11

Analisis Upaya Pendidikan Ekonomi berdasarkan Lapangan Pekerjaan di Tahun 2017

No.	Tingkat Jawaban	Jumlah Responden	Prosentase
1.	Sangat Setuju	3	7,5 %
2.	Setuju	12	30 %
3.	Biasa Saja	9	22,5 %
4.	Kurang Setuju	9	22,5 %
5.	Tidak Setuju Sama Sekali	7	17,5 %
Jumlah		40	100 %

Sumber : Hasil Penelitian Dilapangan, Tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah responden paling banyak memilih setuju, yaitu sebesar 12 orang dengan prosentase 30 %. Kemudian, untuk jumlah responden yang tidak setuju sama sekali, sebanyak 7 orang dengan prosentase 17,5 %, dari jumlah keseluruhan responden sebanyak 40 orang atau 100 %.

Selanjutnya, dari hasil kuisisioner yang diberikan kepada masing-masing responden, mereka berpendapat sebagai berikut :

“Setuju, karena Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul telah membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, meskipun masih dirasakan sangat kurang”. (Hasil Kuisisioner tanggal 7-21 Februari 2018)

Menurut penjelasan dari masing-masing responden, mereka berpendapat Setuju, terhadap kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, dalam membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, maka pemerintah telah bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dan pihak swasta untuk dapat membuka lapangan pekerjaan, sehingga mampu mengurangi pengangguran serta meningkatkan perekonomian masyarakat tersebut.

2) Mengantisipasi Kemiskinan

Kebijakan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul, sesuai dengan uraian tabel sebagai berikut :

Tabel 3.12

Analisis Upaya Pendidikan Ekonomi dalam Mengantisipasi Kemiskinan di Tahun 2017

No.	Tingkat Jawaban	Jumlah Responden	Prosentase
1.	Sangat Setuju	7	17,5 %
2.	Setuju	9	22,5 %
3.	Biasa Saja	11	27,5 %
4.	Kurang Setuju	6	15 %
5.	Tidak Setuju Sama Sekali	7	17,5 %
Jumlah		40	100 %

Sumber : Hasil Penelitian Dilapangan, Tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah responden paling banyak memilih Biasa Saja, yaitu sebesar 11 orang

dengan prosentase 27,5 %. Kemudian, untuk jumlah responden yang tidak setuju sama sekali, sebanyak 7 orang dengan prosentase 17,5 %, dari jumlah keseluruhan responden sebanyak 40 orang atau 100 %.

Selanjutnya, dari hasil kuisisioner yang diberikan kepada masing-masing responden, mereka berpendapat sebagai berikut :

“Biasa saja, karena Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul telah melakukan berbagai upaya untuk dapat mengurangi angka kemiskinan, salah satunya menghimbau masyarakat yang berada dipesisir dan dekat dengan obyek wisata, sehingga masyarakat dapat berwirausaha dan lebih mandiri”. (Hasil Kuisisioner tanggal 7-21 Februari 2018)

Menurut penjelasan dari masing-masing responden, mereka berpendapat biasa saja, terhadap kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul, dalam mengantisipasi kemiskinan. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, maka pemerintah telah bekerjasama dengan Dinas Sosial dan pihak swasta untuk dapat memberikan kontribusi dan mendorong pengentasan kemiskinan di setiap wilayah di Kabupaten Gunungkidul.

B. Pembahasan

Sebagai pembahasan yang sebagaimana telah disampaikan berdasarkan analisis diatas, antara lain sebagai berikut :

1. Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat
 - a. Kebijakan yang dilaksanakan
 - 1) Antisipasi Prostitusi

Dari hasil kuisioner yang diberikan kepada masing-masing responden, dapat disimpulkan bahwa masyarakat paling banyak memilih setuju, karena kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam mengantisipasi prostitusi yang terselubung berdampak positif dan mampu menekan angka penyebaran penyakit HIV AIDS di kalangan masyarakat.

Akan tetapi, masih terdapat masyarakat yang tidak setuju sama sekali terkait kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul. Hal ini, karena kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak memiliki peraturan yang mengikat dan kurangnya sanksi yang tegas terhadap pelaku-pelaku prostitusi serta kesadaran masyarakat terkait penyebaran prostitusi masih tergolong rendah, sehingga kasus-kasus prostitusi masih cenderung sulit untuk diminimalisir. Permasalahan ini, karena prostitusi tersebut dilakukan secara tidak transparan dan tidak diketahui oleh sebagian masyarakat umum.

Berdasarkan wawancara dengan Satpol PP, beliau menjelaskan bahwa:

“Satpol PP Daerah Kabupaten Gunungkidul bekerjasama dengan Satpol PP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam upaya pemberantasan kasus-kasus prostitusi yang umumnya tersebar dikawasan pariwisata dan hotel”. (Hasil wawancara tanggal 19 Februari 2018)

Menurut penjelasan dari Satpol PP tersebut, kasus prostitusi paling banyak ditemukan di kawasan pariwisata, khususnya pinggir

pantai dan hotel-hotel yang ada di wilayah Gunungkidul. Tugas dan fungsi dari Satpol PP di Kabupaten Gunungkidul, hanya bertugas menunjukkan daerah-daerah yang rawan terjadinya prostitusi. Untuk melakukan penindakan, dilaksanakan oleh seluruh Satpol PP baik daerah, maupun provinsi.

Selanjutnya, menurut hasil wawancara dengan Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul, menjelaskan sebagai berikut :

“Dinas Sosial, memiliki tugas untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat, mengenai bahaya prostitusi beserta dampak yang ditimbulkan. Selain itu, Dinas Sosial memiliki peran untuk melakukan rehabilitasi terhadap PSK yang terjaring dan kemudian akan diberikan bimbingan”. (Hasil wawancara tanggal 7 Februari 2018)

Dari hasil wawancara bersama Dinas Sosial diatas, dapat disimpulkan bahwa telah adanya upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul dalam mengurangi kasus-kasus prostitusi. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial, adalah memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan melakukan rehabilitasi kepada PSK yang terjaring yang nantinya akan dibina sebaik mungkin. Untuk dapat mengurangi kasus prostitusi di Gunungkidul, maka pemerintah telah bekerjasama dengan Satpol PP dan Dinas Sosial yang nantinya memiliki tugas dan fungsi dalam menangani permasalahan tersebut.

2) Antisipasi Perjudian

Berdasarkan hasil kuisisioner yang telah diberikan kepada masing-masing responden, dapat disimpulkan bahwa masyarakat paling

banyak memilih setuju, karena permasalahan mengenai perjudian sangat sering terjadi di beberapa wilayah di Gunungkidul. Pada dasarnya, masyarakat yang melakukan perjudian memiliki tingkat perekonomian yang tergolong rendah. akan tetapi, ada beberapa masyarakat yang tergolong mampu, melakukan perjudian yang dilakukan sebagai hobi sehari-hari. Penyakit masyarakat ini, sangat sulit untuk ditanggulangi, dikarenakan telah menjadi budaya turun-temurun antar masyarakat, sehingga penyebaran kasus perjudian masih ada, hingga saat ini.

Namun demikian, masih terdapat masyarakat yang tidak setuju sama sekali, karena penanganan kasus perjudian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul, cenderung lama dan tidak memiliki sanksi yang tegas. Pemerintah perlu melakukan evaluasi terkait kebijakan-kebijakan yang telah dilaksanakan, sehingga masyarakat yang terjerat dapat berubah menjadi lebih baik.

Dari hasil wawancara bersama Satuan Reserse Kriminal Polres Kabupaten Gunungkidul, menyatakan bahwa :

“Dalam mengurangi kasus perjudian, maka Polres telah melakukan rajia disetiap wilayah yang dianggap rawan perjudian. Apabila terdapat laporan dari masyarakat terkait perjudian tersebut, maka pihak polres akan segera bertindak dan melakukan penangkapan terhadap tersangka tersebut”. (Hasil wawancara tanggal 12 Februari 2018)

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa pihak Polres khususnya Satuan Reserse Kriminal Polres Kabupaten Gunungkidul, telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan

ketentuan yang telah ditetapkan. Polres dalam hal ini juga bekerjasama dengan Satpol PP dalam meningkatkan keamanan, sehingga dalam proses pelaksanaan dapat berjalan dengan baik. Selain itu, Polres juga memberikan himbauan kepada masyarakat, untuk segera memberikan informasi kepada Polres, apabila melihat dan mengetahui kasus-kasus perjudian yang terjadi di lingkungan masyarakat tersebut.

b. Kebijakan yang diantisipasi

1) Antisipasi Narkoba

Dari hasil kuisioner yang telah diberikan kepada masing-masing responden, dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang paling banyak memilih setuju, karena permasalahan mengenai narkoba harus segera ditangani. Kasus-kasus penggunaan narkoba, merupakan permasalahan yang sangat serius, karena peredarannya selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Pada saat ini, narkoba sering digunakan oleh masyarakat khususnya anak muda, tanpa mengetahui dampak dan efek samping dari penggunaan narkoba tersebut. Kurangnya pemahaman masyarakat, terkait dampak yang ditimbulkan dari penggunaan narkoba, menjadi salah satu faktor utama, sehingga masyarakat mudah terjerumus kedalam obat terlarang tersebut. Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul, perlu melakukan perbaikan-

perbaikan terkait sistem keluar masuk barang, yang dimana pengamanannya dirasakan sangat kurang, sehingga narkoba sangat dengan mudah masuk ke daerah tersebut.

Dari hasil wawancara bersama Satuan Reserse Narkoba Polres Kabupaten Gunungkidul, menyatakan bahwa :

“Penggunaan narkoba, sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor agama, yang dimana tingkat keimanan yang dirasakan sangat kurang, sehingga seseorang sangat mudah terjerumus dalam barang berbahaya tersebut. Selanjutnya, faktor keluarga sangat mempengaruhi pola pikir anak. Pada saat ini, banyak orang tua yang hanya mementingkan pekerjaan, tanpa melihat bagaimana pertumbuhan psikologis dari anak itu sendiri, yang pada akhirnya menyebabkan anak tersebut sangat rentan untung menggunakan barang haram tersebut dan faktor ketiga yaitu faktor lingkungan”. (Hasil wawancara tanggal 12 Februari 2018)

Menurut penjelasan dari Satuan Reserse Kriminal Polres Kabupaten Gunungkidul, memaparkan bahwa pengguna narkoba sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor tertentu, seperti faktor agama, faktor keluarga dan faktor lingkungan. Dari sisi faktor agama, seseorang sangat rentan menggunakan narkoba, jika tidak memiliki keteguhan iman dan kurang mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga pola pikir yang dibentuk tidak sesuai apa yang diharapkan.

Dari sisi faktor keluarga, sangat dipengaruhi oleh orang tua yang mendidik anaknya sejak dini dan memberikan pemahaman kepada anak tersebut, mengenai sesuatu yang dilarang oleh agama. Kemudian, faktor lingkungan yang dimana dipengaruhi oleh pergaulan antar lingkungan masyarakat dan ingin mencoba hal-hal

baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya, menjadikan seseorang tersebut mudah mengikuti sesuatu yang dilarang bahkan berbahaya sekalipun. Melihat hal tersebut, maka perlu adanya dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, polres dan BNN untuk memberantas pengedar dan pengguna narkoba di lingkungan masyarakat.

Upaya yang dilakukan oleh pihak Polres yaitu dengan mengumpulkan informasi-informasi yang ada dan melakukan penggrebekan ditempat-tempat yang telah ditentukan. kemudian, Polres juga akan dibantu oleh pihak BNN untuk mengamankan barang bukti, berupa narkoba beserta alat lainnya.

Setelah dilakukan penangkapan, pelaku akan diperiksa oleh Pihak BNN dan akan ditentukan apakah tersangka tersebut pengedar atau pengguna dari narkoba tersebut. Apabila tersangka merupakan seorang pengedar, maka akan dijatuhkan hukuman dan pengguna akan dilakukan rehabilitasi serta akan diberikan bimbingan dan arahan nantinya.

2) Antisipasi Miras

Dari hasil kuisisioner yang telah diberikan kepada masing-masing responden, dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang paling banyak memilih biasa saja, karena permasalahan mengenai miras masih terus terjadi dan tidak adanya efek jera yang diberikan kepada pengguna maupun pengedar miras tersebut. Hukuman yang diberikan kepada

para tersangka dirasakan kurang tegas, sehingga tersangka dapat leluasa melakukan perbuatan itu lagi.

Para pengguna miras tersebut terdiri dari anak remaja dan orang dewasa, bahkan terdapat ada beberapa anak yang masih berada dibawah umur. Hal tersebut, dikarenakan kurangnya pengawasan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya, sehingga anak dapat dengan mudah terpengaruh dengan pergaulan bebas. Pemerintah Daerah Gunungkidul, perlu membuat kebijakan-kebijakan yang tepat sasaran dan mampu memberikan efek jera, sehingga pelaku maupun pengedar tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut.

Berdasarkan wawancara bersama Satuan Reserse Kriminal Polres Kabupaten Gunungkidul, menyatakan bahwa :

“Untuk minuman berakohol, berdasarkan data dari Satgas Polres Kabupaten Gunungkidul, yaitu terdiri dari golongan A, B, C, yang dimana salah satunya terdiri dari 0-5 %. Dalam mengoptimalkan penyebaran miras tersebut, maka Polres telah dibantu organisasi masyarakat setempat dan anggota PKK yang bersedia membantu mengawasi lingkungan masyarakat”. (Hasil wawancara tanggal 12 Februari 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa minuman berakohol terdiri dari 3 golongan, yaitu golongan A, B dan C. Di Daerah Kabupaten Gunungkidul, Golongan yang sering terjaring yaitu Golongan A dengan 0-5 %. Dalam proses penangkapan dan keamanan, maka Polres telah bekerjasama dengan Disperindang dan dibantu oleh organisasi masyarakat serta anggota PKK yang

tersebar dimasing-masing wilayah, sehingga angka penggunaan wilayah dapat berkurang.

Untuk dapat mengurangi peredaran miras, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul telah menetapkan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2010, tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Berakohol di Kabupaten Gunungkidul. Tersangka pengedar dan pengguna miras tersebut, nantinya akan sidang pengadilan sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan.

c. Lingkungan

1. Keluarga

1) Sosialisasi Dinas Pendidikan

Dari hasil kuisioner yang telah diberikan kepada masing-masing responden, dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang paling banyak memilih setuju, karena pendidikan keluarga merupakan pondasi utama dalam membentuk pola pikir dan tumbuh kembang anak. Peran dari setiap orang tua sangat diperlukan, mengingat setiap setiap perilaku dan sikap yang ditimbulkan oleh setiap anak, merupakan cerminan dari orang tua yang mendidik anaknya sejak dini. Apabila tidak adanya peran orang tua, maka pertumbuhan psikologis anak akan terganggu dan dapat menimbulkan dampak negatif. Pada saat ini, banyak anak remaja yang memiliki perilaku menyimpang, karena

kurangnya pendidikan yang diberikan oleh keluarga, khususnya orang tua.

Untuk dapat mengurangi perilaku menyimpang tersebut, maka Pemerintah khususnya Dinas Pendidikan telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pendidikan bagi anak. Selain itu, Dinas Pendidikan juga memberikan arahan dan motivasi kepada masyarakat mengenai cara mendidik anak sejak dini.

Dari hasil wawancara dengan Dinas Pendidikan, menjelaskan bahwa sebagai berikut :

“Pemerintah dalam hal ini, yaitu Dinas Pendidikan telah memberikan sosialisasi dan arahan kepada masyarakat mengenai dampak kurangnya pendidikan keluarga bagi anak usia dini. Kemudian, Dinas Pendidikan juga telah melakukan himbauan kepada masing-masing sekolah di Kabupaten Gunungkidul, untuk dapat meningkatkan standart dan kualitas pendidikan di sekolah”. (Hasil wawancara tanggal 16 Februari 2018)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul telah melakukan berbagai upaya untuk dapat meningkatkan pendidikan yang ada di lingkungan masyarakat, dengan cara memberikann sosialisasi dan arahan untuk dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tersebut. Dinas Pendidikan juga telah melakukan kerjasama dengan setiap sekolah di Kabupaten Gunungkidul dan menghimbau untuk dapat meningkatkan kualitas pendidikan yang ada, sehingga perilaku menyimpang dapat diminimalisir.

2) Sosialisasi Dinas Sosial

Dari hasil kuisioner yang telah diberikan kepada masing-masing responden, dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang paling banyak memilih setuju, karena peran dari Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul, untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pencegahan dan dampak yang ditimbulkan dari kurangnya peran keluarga dan orang tua bagi pertumbuhan anak. Dinas Sosial juga telah memberikan himbauan dan arahan kepada masyarakat mengenai perilaku menyimpang dan bahaya penyakit masyarakat tersebut.

Pada saat ini, banyak anak-anak dibawah umur yang memiliki perilaku menyimpang, seperti : minum-minuman keras, seks bebas, berjudi, narkoba dan lain sebagainya. Hal ini, disebabkan karena kurangnya pendidikan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya, sehingga ada mudah terpengaruh oleh lingkungan luar dan merubah pola pikir dari anak tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul, menjelaskan sebagai berikut :

“Untuk Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul, hanya memiliki wewenang untuk melakukan rehabilitasi bagi wanita tuna sosial (WTS). Dalam permasalahan seperti perjudian, miras, narkoba dan lain sebagainya, Dinas Sosial hanya ikut terlibat dalam memberi sosialisasi di setiap sekolah dan di

lingkungan masyarakat”. (Hasil wawancara tanggal 7 Februari 2018)

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial tidak memiliki keterlibatan langsung dalam melakukan pencegahan dan pengamanan terhadap kasus-kasus penyakit masyarakat di wilayah tertentu. Dinas Sosial hanya terlibat dalam memberikan rehabilitasi bagi Wanita Tuna Sosial (WTS), yang nantinya akan diberi arahan dan motivasi untuk dapat bekerja sesuai dengan keterampilan yang dimiliki.

Selanjutnya, dalam penanganan permasalahan seperti miras, narkoba, perjudian dan lain-lain, Dinas Sosial hanya berperan aktif dalam memberikan sosialisasi disekolah-sekolah tentang bahaya narkoba, miras, pergaulan bebas. Selain itu, Dinas Sosial juga melakukan sosialisasi di lingkungan masyarakat mengenai dampak yang ditimbulkan dari penyakit masyarakat tersebut, beserta dengan penanganan yang dilakukan. Dengan adanya, sosialisasi yang diberikan, diharapkan mampu merubah pola pikir masyarakat khususnya anak remaja dan orang tua agar mampu mendidik dan mengontrol anak sejak dini.

2. Agama

1) Al-Qur'an

Dari hasil kuisioner yang telah diberikan kepada masing-masing responden, dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang paling banyak

memilih setuju, karena pendidikan agama sangat diperlukan dalam membentuk kepribadian seorang anak agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Pendidikan agama dalam hal ini, yaitu melalui Al-Qur'an, yang dimana berfungsi sebagai pedoman dan petunjuk dalam menjalani kehidupan sosial nantinya.

Pendidikan agama, khususnya Al-Qur'an memberikan dampak positif terhadap lingkungan masyarakat dan mampu menekan angka penyakit masyarakat tersebut. Dalam pendidikan agama, peran pemerintah terutama Kantor Agama yaitu memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya pendidikan agama dan pembelajaran mengenai Al-Qur'an sejak dini. Di dalam Al-Qur'an telah menjelaskan tentang seluruh kehidupan di dunia, maupun di akhirat dan memberikan penjelasan terkait perbuatan yang baik dan buru.

Berdasarkan wawancara di Kantor Agama Kabupaten Gunungkidul, menjelaskan sebagai berikut :

“Kantor agama dalam hal penyakit masyarakat, memiliki peran untuk memberikan sosialisasi dan arahan melalui ceramah dan pengajian-pengajian yang diselenggarakan disetiap wilayah tertentu. Isi dari ceramah tersebut yaitu, penjelasan terkait perbuatan yang dilarang dan diperbolehkan oleh agama dan menjelaskan Al-Qur'an merupakan sebuah petunjuk dan penuntun bagi kehidupan manusia, sehingga memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan menyimpang tersebut”. (Hasil wawancara tanggal 21 Februari 2018)

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bawa peran pendidikan agama khususnya Al-Qur'an sangat diperlukan dalam kehidupan

sehari-hari. Setiap orang tua, dan keluarga perlu menerapkan pendidikan agama bagi anak dan anggota keluarganya, sehingga kasus-kasus penyakit masyarakat dapat dihindari. Proses pemberian pemahaman terkait pendidikan agama, tidak terlepas dari peran Kantor Agama dan masyarakat. Pemerintah perlu melakukan koordinasi dengan masyarakat, khususnya tokoh-tokoh agama yang ada, untuk memberikan kajian-kajian dan dorongan kepada masyarakat, agar dapat menghindari penyakit masyarakat tersebut.

2) Hadits

Dari hasil kuisioner yang telah diberikan kepada masing-masing responden, dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang paling banyak memilih biasa saja, karena pendidikan agama melalui Al-Hadits belum sepenuhnya dipahami dan dimengerti oleh masyarakat. Hal tersebut, karena banyak dari kalangan masyarakat yang hanya sekedar membaca, tanpa mengetahui inti dan makna dari setiap Al-Hadits yang ada, sehingga masyarakat mudah terjerumus kedalam penyakit masyarakat.

Pada saat ini, banyak Al-Hadits yang beredar di lingkungan masyarakat tidak sesuai dengan apa yang ada didalam Al-Qur'an, sehingga masyarakat perlu memilih Al-Hadits sesuai dengan sumber aslinya. Peran dari Kantor Agama sangat diperlukan dalam memberikan Al-Hadits yang lengkap dan sesuai dengan apa yang ada di Al-Qur'an. Kantor Agama dalam hal pendidikan agama melalui Al-

Hadits yaitu menjelaskan terkait perilaku dan sikap yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW.

Dari hasil wawancara bersama Kantor Agama, menjelaskan sebagai berikut :

“Kantor Agama bekerjasama dengan organisasi masyarakat yang ada untuk memberikan pengajian-pengajian di setiap daerah dan menjelaskan terkait pentingnya pendidikan agama bagi lingkungan masyarakat. Selain itu, dalam pengajian yang dilakukan berisikan materi-materi terkait dampak dari penyakit masyarakat, beserta cara mengatasinya sesuai dengan syari’at agama islam”. (Hasil wawancara tanggal 21 Februari 2018)

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan agama melalui Al-Hadits sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, karena berfungsi sebagai pedoman dan petunjuk kearah jalan yang benar. Peran dari masing-masing pihak Kantor Agama, maupun masyarakat sangat diperlukan, mengingat masyarakat memiliki peran penggerak dan sebagai pihak penerima dari pendidikan yang telah diberikan. Oleh karena itu, perlu adanya koordinasi yang dilakukan oleh antara Kantor Agama dan masyarakat dalam menciptakan kehidupan yang harmonis.

3. Budaya

1) Budaya Bangsa

Dari hasil kuisioner yang telah diberikan kepada masing-masing responden, dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang paling banyak memilih setuju, karena budaya bangsa perlu dilestarikan dan dijaga keberlangsungan adat istiadatnya. Budaya bangsa merupakan

identitas bangsa yang, menjadi ciri khas dan berbeda dari negara lain yang perlu dipertahankan.

Peran pemerintah sangat penting dalam mendukung keberlangsungan budaya bangsa, agar lebih dikenal oleh masyarakat luas. Budaya bangsa harus ditanamkan kedalam setiap masyarakat, dengan cara memberikan pendidikan yang berkualitas dan memberikan motivasi kepada masyarakat, khususnya anak remaja sebagai generasi yang akan datang, terkait pentingnya budaya bagi identitas bangsa itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Dinas Kebudayaan, menjelaskan bahwa :

“Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul, telah melakukan beberapa upaya untuk dapat melestarikan Budaya Bangsa, yaitu dengan mengadakan acara dan perlombaan guna memperingati hari-hari bersejarah. Hal tersebut, sangat disambut baik dan mendapat apresiasi dari masyarakat, sehingga perlu kita tingkat lagi proses pelaksanaannya”. (Hasil wawancara tanggal 16 Februari 2018)

Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam melestarikan budaya bangsa, mendapat tanggapan positif dari masyarakat. Untuk dapat mengoptimalkan kebijakan tersebut, maka Dinas Kebudayaan telah melakukan kerjasama dengan pihak sekolah, dalam rangka memperkenalkan sejarah budaya bangsa kepada anak-anak sejak dini. Pemerintah perlu menetapkan kebijakan-kebijakan yang tepat sasaran dan perlu adanya dukungan dari berbagai pihak, sehingga proses

pelaksanaan kebijakan tersebut dapat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

2) Budaya Daerah

Dari hasil kuisisioner yang telah diberikan kepada masing-masing responden, dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang paling banyak memilih setuju, karena budaya daerah merupakan suatu unsur yang harus dijaga dan dilestarikan. Budaya daerah, secara langsung memberikan kehidupan bagi masyarakat, yang dimana telah dilakukan sejak lama dan telah menjadi turun temurun dalam kehidupan masyarakat.

Pada saat ini, banyak kalangan masyarakat khususnya anak remaja, yang mulai meninggalkan budaya daerah dan mengikuti budaya asing yang dianggap lebih modern, sehingga budaya daerah sudah sangat sulit ditemukan. Dalam hal ini, peran pemerintah khususnya Dinas Kebudayaan sangat diperlukan, karena kebijakan-kebijakan yang diambil sangat mempengaruhi proses pelaksanaan nantinya. Dinas Kebudayaan perlu mengadakan kegiatan-kegiatan pelestarian budaya daerah dan menyediakan sarana yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga masyarakat dapat tertarik untuk melestarikan budaya daerah tersebut.

Dari hasil wawancara bersama Dinas Kebudayaan, menjelaskan bahwa :

“Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul, telah melakukan upaya seperti mengadakan acara pentas budaya,

menyediakan sarana yang dibutuhkan dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar mau ikut berpartisipasi dalam melestarikan budaya daerah tersebut". (Hasil wawancara tanggal 16 Februari 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul telah melakukan beberapa upaya untuk melestarikan budaya daerah, yaitu dengan mengadakan acara pentas budaya, menyediakan sarana, memberikan sosialisasi dan mendorong keterampilan anak remaja untuk lebih mengenal budaya daerah yang dimiliki. Dinas Sosial harus mendorong dan memberikan arahan kepada masyarakat, agar dapat bekerjasama dalam melestarikan budaya daerah yang dimiliki, sehingga dapat lebih dikenal dan menjadi kebanggaan bagi Daerah itu sendiri.

4. Ekonomi

1) Lapangan Pekerjaan

Dari hasil kuisioner yang telah diberikan kepada masing-masing responden, dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang paling banyak memilih setuju, karena peran Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul sangat diperlukan dalam mendorong pembangunan agar lebih tepat sasaran. Di daerah Kabupaten Gunungkidul, masih terdapat masyarakat yang pengangguran, karena disebabkan kurangnya lapangan pekerjaan yang diberikan dan keterampilan yang dimiliki kurang memadai.

Daerah Kabupaten Gunungkidul, merupakan suatu daerah yang memiliki obyek wisata yang sangat banyak terutama obyek wisata pantai pesisir yang dimiliki. Keindahan pantai ini, mampu menarik wisatawan asing maupun wisatawan lokal untuk berkunjung di daerah tersebut. Meskipun demikian, banyaknya obyek wisata di daerah Kabupaten Gunungkidul tidak diikuti dengan perkembangan ekonomi yang memadai.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Staff Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul, menjelaskan bahwa :

“Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul, telah melakukan berbagai upaya untuk dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, salah satunya dengan membuat pembangunan di daerah-daerah strategis dekat dengan Obyek wisata dan memberikan pelatihan kerja, yaitu bekerjasama dengan pihak Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)”. (Hasil wawancara tanggal 15 Februari 2018)

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul telah melakukan upaya-upaya untuk dapat membuka lapangan pekerjaan, sehingga angka pengangguran dapat diminimalisir serendah mungkin. Salah satu upaya pemerintah adalah dengan membuat pembangunan di daerah pesisir pantai dan melakukan promosi agar dapat menarik wisatawan untuk berkunjung di Gunungkidul. Kemudian, pemerintah juga melakukan pelatihan kepada masyarakat untuk mengembangkan kreativitas dan keterampilan yang dimiliki, yaitu bekerjasama dengan

pihak LPK. Dari adanya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, diharapkan mampu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan mengurangi pengangguran di daerah pesisir.

2) Mengantisipasi Kemiskinan

Dari hasil kuisioner yang telah diberikan kepada masing-masing responden, dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang paling banyak memilih biasa, karena peran Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul, dirasakan tidak memiliki perubahan yang signifikan. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal ini, karena adanya perbedaan antara kebijakan yang dibuat dengan pelaksanaan kegiatan dilapangan, sehingga pemerintah perlu melakukan evaluasi terkait kebijakan-kebijakan tersebut.

Salah satu upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul yaitu: dengan membuka lapangan pekerjaan, memberikan pelatihan, memberikan sosialisasi, melakukan promosi obyek wisata yang dimiliki, membuat kerajinan tangan dan lain sebagainya.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Staff Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul, menjelaskan bahwa :

“Untuk mengurangi kemiskinan di Daerah Kabupaten Gunungkidul, pemerintah telah melakukan upaya seperti: memberikan pelatihan, membuka kerajinan tangan, membuka lapangan pekerjaan dan lain sebagainya, sehingga perekonomian masyarakat dapat meningkat. Pemerintah juga telah melakukan koordinasi dengan pihak swasta terkait pembangunan yang akan dilakukan, sehingga mampu

menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat". (Hasil wawancara tanggal 15 Februari 2018)

Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa pemerintah telah melakukan upaya-upaya dalam mengurangi kemiskinan di daerah Gunungkidul. Akan tetapi, hal tersebut sangat bergantung kepada kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Masyarakat dituntut untuk dapat meningkatkan kreatifitas dan kerajinan yang dimiliki. Kebijakan pemerintah, harus dilakukan evaluasi lebih mendalam dan bekerjasama dengan pihak swasta agar mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat setempat dan mengurangi kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul.

5. Kendala yang Dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat.

a. Kurangnya Sosialisasi

Di Daerah Kabupaten Gunungkidul, sosialisasi yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat, dirasakan sangat kurang. Hal ini, karena jumlah tenaga penyuluh yang ada di daerah Gunungkidul kurang memadai, sehingga sosialisasi yang diberikan tidak berjalan dengan baik. Selain itu, SDM yang dimiliki oleh tenaga penyuluh tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Permasalahan ini, secara tidak langsung menyebabkan kurangnya pemahaman masyarakat, terkait bahaya penyakit masyarakat tersebut. Pemerintah, perlu

melakukan evaluasi terkait SDM yang dimiliki oleh masing-masing tenaga penyuluh.

Kemudian, kurangnya kesadaran masyarakat terkait dampak yang ditimbulkan dari penyakit masyarakat, menyebabkan permasalahan tersebut sulit untuk ditanggulangi. Pemerintah harus melakukan kerjasama dengan masing-masing stakeholder terkait, sehingga proses penanggulangan penyakit masyarakat dapat berjalan dengan baik.

b. Kebijakan yang kurang memadai

Pada saat ini, kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul, dirasakan kurang memadai. Hal ini, karena dalam membuat suatu kebijakan, pemerintah tidak mempertimbangkan dampak dari kebijakan tersebut. Kebijakan yang kurang tepat, dapat menimbulkan permasalahan baru yang semakin kompleks. Pemerintah perlu menetapkan kebijakan-kebijakan yang terarah dan melakukan himbauan kepada setiap instansi pemerintah, maupun masyarakat untuk dapat bekerjasama dalam menanggulangi penyebaran penyakit masyarakat di Daerah Kabupaten Gunungkidul.

c. Peraturan yang kurang tegas

Permasalahan penyakit masyarakat, dapat ditimbulkan dari adanya peraturan yang kurang tegas dan tidak memihak kepada masyarakat. Peraturan yang kurang tegas, menyebabkan seseorang

mudah terlibat kedalam tindak kejahatan dan membuat seseorang tersebut tidak takut dengan hukuman yang ada, sehingga pelaku mudah mengulangi perbuatannya.

Pemerintah dalam hal ini, perlu membuat peraturan yang tegas dan mengikat serta memberikan efek jera kepada pelaku, agar tidak meresahkan masyarakat. Semua aparat penegak hukum dan masyarakat harus bekerjasama dalam memberantas penyebaran penyakit masyarakat di Daerah Kabupaten Gunungkidul.

d. Kurangnya Pelatihan dan Lapangan Pekerjaan

Untuk dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, pemerintah perlu membuka pelatihan kerja bagi masyarakat, agar memiliki keterampilan dan kreatifitas yang dibutuhkan. Di Daerah Kabupaten Gunungkidul, jumlah kemiskinan dan pengangguran masih dirasakan cukup tinggi serta sangat rawan terjadinya tindak kriminalitas. Pada dasarnya, masyarakat Gunungkidul memiliki pekerjaan yang mayoritasnya sebagai petani dan buruh lepas, sehingga kebutuhan hidup sulit terpenuhi.

Selain itu, SDM yang dimiliki oleh masyarakat setempat dirasakan sangat rendah dan tidak dapat bersaing, yang pada akhirnya menyebabkan pengangguran dan kemiskinan. Pemerintah perlu memberikan pelatihan kerja, kepada masyarakat khususnya remaja yang memiliki potensi dan keterampilan, agar mampu memperbaiki

kondisi perekonomian serta menciptakan masyarakat yang mandiri di masa yang akan datang. Kemudian pemerintah perlu melakukan kerjasama dengan pihak swasta untuk dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat.